

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan satuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan, serta masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak keberadaan, dan atau hak tradisional yang telah terkonfirmasi dan dihargai dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan NKRI hal ini tercantum dalam Permendagri/20/2018 pasal 1. Desa mempunyai peran dalam mengurus aturannya dan memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam UU/6/2014 dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pengetahuan masyarakat dan pemberdayaan desa. Desa kini menjadi tombak awal pembangunan bangsa di tingkat pemerintahan dikarenakan pemerintah menjadikan Desa sebagai prioritas pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang biasanya disebut APBDes yang berupa rancangan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa dirancang dan disahkan bersama oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta disahkan dalam aturan Desa.

Sebagaimana diketahui bahwa APBDes didalamnya memiliki elemen-elemen keuangan yang disusun bersama antara pemerintah Desa dengan BPD guna meningkatkan pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Sebagaimana APBDes yang sudah disusun dan anggarkan harus diwujudkan serta memberikan pertanggungjawaban kepada warga setempat sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Village Governance*). Haryanto (2007) menyatakan bahwa partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan merupakan pedoman dan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Prinsip yang sudah ditetapkan dalam *good governance* harus diterapkan dalam pengelolaan APBDes sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di Desa. Selain itu,

berdasarkan dalam Permendes/3/2015 tentang pendampingan desa menjelaskan bahwa “Setiap desa perlu dalam melakukan pengelolaan dana desa. Pendampingan dengan tujuan memberi arahan terhadap pengelolaan APBDes, dalam hal meningkatkan kemampuan, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa; mewujudkan ide/gagasan, kephahaman dan keikutsertaan warga setempat dalam pembangunan desa yang saling berkontribusi; meningkatkan kerjasama kemajuan antar bidang; dan meningkatkan sumber daya lokal desa”. Dengan terlaksananya tujuan dari pendampingan tersebut akan tercipta situasi dan kondisi Desa yang sejahtera serta memiliki kemampuan meningkatkan kemajuan Desa tersebut.

APBDes dijalankan dalam pembiayaan penyelenggaran pemerintahan, dalam berbagai aspek yang berkaitan baik dari segi sosial maupun ekonomi guna kesejahteraan. Dana Desa yang cukup besar yang berasal dari APBDes seharusnya mampu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang sudah direncanakan. Berdasarkan UU/6/2014 Pasal 71/1 menyatakan bahwa “Keuangan Desa dimaksudkan untuk pembiayaan program yang dijalankan Desa”. Permendagri/20/2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan “Keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan”. Pengelolaan APBDes yang baik akan berdampak kepada kesejahteraan dan lingkungan desa. Selain itu terlaksananya program yang dilaksanakan oleh Desa tidak terlepas dari adanya aparatur pemerintahan yang menjadi pelaksana kegiatan. Aparatur pemerintahan Desa membutuhkan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang kemampuan dalam menjalankan pemerintahan. Berbagai informasi yang relevan serta dapat menjadi penunjang kemajuan Desa sangat dibutuhkan. Sistem informasi akuntansi (SIA) hadir untuk menciptakan kebermanfaat untuk masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. SIA yaitu suatu kegiatan mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisa, dan menginformasi laporan yang sesuai untuk menentukan keputusan oleh pihak-pihak luar dan internal terutama manajemen dalam elemen organisasi hal ini disampaikan oleh Steven A. Moscove dalam (Zamzami, F dkk, 2021). Kelancaran sebuah sistem informasi

Angginun Juwita Sari Harahap, 2023

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI KASUS DESA KARACAK KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

akuntansi didukung pula oleh pengendalian internalnya. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sistem informasi akuntansi di pemerintahan Desa kini berkaitan dengan pengguna informasi ataupun pengguna aplikasi SisKeuDes.

Desa Karacak berada di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah 710,023 Ha, termasuk Desa maju dalam hal pembangunan. Dengan jarak ke pusat Kecamatan 5 km dan ke pusat Kabupaten 48 km. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa diatur dalam Permendagri/84/2015 yang menjelaskan bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris Desa (SekDes), Staf, Kadus, LPM serta RT, RW selaku petugas teknis lapangan. Terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang mana akan berdampak pula terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat didalamnya, dalam pemerintahan Desa menggunakan aplikasi SisKeuDes guna menghasilkan informasi keuangan yang akurat, efektif dan efisien melalui berbagai tahapan dalam pengelolaan APBDes. Aplikasi SisKeuDes yang diciptakan oleh BPKP dalam pengelolaan keuangan desa adalah sistem keuangan desa yang dikembangkan sejak tahun 2015. Di tahun 2019 pengelola keuangan Desa dalam hal ini operator SisKeuDes dipastikan harus mampu untuk menggunakan aplikasi SisKeuDes 2.0. Aplikasi SisKeuDes dilengkapi oleh sistem pengendalian internal, gampang digunakan, terintegrasi dengan aplikasi lain yang bersangkutan dalam hal ini pemerintah kecamatan pun dapat melakukan pengawasan terkait dengan pelaporan yang diberikan. APBDes yang berpedoman kepada peraturan daerah kabupaten, dan juga dalam proses pengelolaannya berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh setiap Desa berdasarkan kebutuhan masyarakatnya, sehingga diharapkan menjadi APBDes yang partisipatif dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat terkait gagasan yang diajukan.

Dalam penelitian Bibit (2021) tentang “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan Pada Kantor Balai Desa Karangembang”. Hasilnya menunjukkan bahwa SIA memiliki dampak terhadap kinerja keuangan kantor Balai Desa Karangembang. Responden memberikan penilaian terhadap SIA dengan 74% dan 34% penilaian terhadap kinerja keuangan, hal ini menandakan bahwa

Angginun Juwita Sari Harahap, 2023

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI KASUS DESA KARACAK KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

SIA memiliki dampak terhadap kinerja keuangan sehingga dengan penerapan SIA yang baik akan berdampak terhadap nilai kinerja keuangan tersebut. Sedangkan penelitian Abdullah dan Samad (2021) tentang “Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan)”. Hasilnya menunjukkan SisKeuDes belum memiliki dampak signifikan terhadap kinerja kepala Desa sebagai kepala penyelenggara pemerintahan di tahun anggaran tersebut terkhusus dalam proses serta hasil pengelolaan administrasi dana desa dan anggaran dana desa yang dirasakan langsung oleh pemerintahan Desa serta warga setempat. Dalam penelitian ini dibuktikan dari minimnya SDM yang mendukung proses pengelolaan keuangan desa dengan pengetahuan terhadap teknologi maka pentingnya ditingkatkan kapasitas melalui pendampingan dan pelatihan terkait SisKeuDes tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, penelitian yang disajikan oleh penulis memiliki kebaruan yakni dalam hal memberikan solusi terkait permasalahan yang dirasakan oleh pemerintahan Desa dalam proses pengelolaan APBDes melalui sistem informasi akuntansi yang lebih baik dan relevan, selain itu lokasi penelitian ini merupakan wilayah pelosok yang sehingga menjadi faktor ketertarikan untuk mendalaminya, maka dari itu hal tersebutlah yang menjadi pembaharuan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis buat. Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian terkait pengelolaan SIA terhadap APBDes ini didapatkan dari adanya hasil observasi awal yang dilakukan peneliti serta penelitian terdahulu yang membahas seputar pengelolaan APBDes tersebut. Observasi awal dilakukan langsung dengan mendatangi kantor Desa Karacak Kec.Leuwiliang, Kab.Bogor pada Agustus 2022.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Karacak, peneliti bertemu dengan Bapak Iwan selaku kepala seksi Kesejahteraan Masyarakat terdapat catatan bahwa pengelolaan dana desa dalam hal alokasi dana pemberdayaan masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran lainnya dikarenakan pada saat musyawaran perencanaan pembangunan (MusrenbangDes) pengajuan lebih banyak terkait infrastruktur dibandingkan dengan program yang berkaitan dengan

Angginun Juwita Sari Harahap, 2023

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI KASUS DESA KARACAK KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

pemberdayaan masyarakat yang mana sebenarnya akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, selain itu permasalahan yang dihadapi terkait proses penginputan rancangan anggaran yang dilakukan oleh para pengelola keuangan desa dan operator SisKeuDes merasa kesulitan dalam memahami pembaruan informasi yang tertera dalam aplikasi SisKeuDes karena selalu melakukan *update* setiap tahunnya. Selain itu peneliti pun melakukan observasi awal terhadap pengetahuan masyarakat terkait dengan APBDes tersebut yang mana seorang warga yang bernama Suryati menyatakan bahwa dia kurang mengetahui peruntukan anggaran APBDes baik berkaitan dengan pendapatan Desa ataupun pengeluaran Desa tersebut. Maka dari itu temuan awal penelitian berkaitan juga dengan kurangnya transparansi dalam pelaporan pertanggungjawaban APBDes kepada masyarakat serta kurangnya keingin tahuan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan Desa. Maka dari itu berdasarkan data diatas peneliti membahas penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Kracak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor)”**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu SIA dalam pengelolaan APBDes di Desa Kracak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Yang mana pokok fokus penelitian terdapat pada pengelolaan APBDes serta kendala yang dihadapi pemerintahan Desa Kracak terkait dengan SIA dalam pengelolaan APBDes. Dalam hal Pengelolaan APBDes ini apakah sudah sesuai dengan Permendagri/20/2018, serta permasalahan atau kendala yang dirasakan dalam proses penerapan SIA terhadap pengelolaan APBDes tersebut yang mana akan berkaitan dengan pengendalian internal dalam proses pengelolaan APBDes serta mampu menghadirkan solusi atas kendala yang dihadapi dalam persoalan yang ada di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

Angginun Juwita Sari Harahap, 2023

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI KASUS DESA KARACAK KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

I.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Desa Karacak Kec.Leuwiliang Kab.Bogor?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penerapan sistem informasi akuntansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Desa Karacak Kec.Leuwiliang Kab.Bogor?
3. Bagaimana solusi atas kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi akuntansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Desa Karacak Kec.Leuwiliang Kab.Bogor?

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan SIA pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Desa Karacak Kec.Leuwiliang Kab.Bogor
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi akuntansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Desa Karacak Kec.Leuwiliang Kab.Bogor
3. Memberikan solusi atas kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi akuntansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Desa Karacak Kec.Leuwiliang Kab.Bogor

I.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengelompokkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

a. Aspek Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu menambah informasi terkait SIA dalam pengelolaan APBDes pada Desa Karacak Kec.Leuwiliang Kab.Bogor. Dalam hal tersebut penulis memaparkan bahwa hasil penelitian tersebut dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait ilmu akuntansi

Angginun Juwita Sari Harahap, 2023

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI KASUS DESA KARACAK KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

sektor publik dan hal yang perlu diketahui oleh aparaturnya Desa terkait sistem informasi akuntansi sehingga mampu melaksanakan sistem pengelolaan APBDes dengan lebih baik.

b. Aspek Praktis

1. Bagi Pemerintah

Menjadi referensi untuk membuat peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan penerapan sistem informasi akuntansi di ruang lingkup pemerintahan daerah dengan memperhatikan berbagai aspek penting yang akan mendukung efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi.

2. Bagi Penelitian selanjutnya

Sebagai sumber referensi sekaligus wawasan yang menggambarkan perihal informasi akuntansi sektor publik dan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.